

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ashworth, Andrew. *Principle of Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press, 1991, (dikutip dalam Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2006.)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, 2015.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana* (Hasnan, Penerjemah). Jakarta: Binacipta, 1984.
- Christiansen, Karl O., *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7. Tokyo: UNAFEI, 1974.
- Endro, Didik, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- Gunakaya, Widiada, & Mas Putra Zenno, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKUHP*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Cetakan Kesatu). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma. 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, & Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.
- Partisipasiku, *Pidana Mati: Pidana Mati pada KUHP* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023)
- Purba, Nelvita, *Hukuman Mati: Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia*. Medan: Format Publishing, 2021.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Santoso, Sani Imam, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling* (Cet. 1). Jakarta: Penaku, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cetakan Kedua). Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sholehudin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya* (Cetakan Kedua). Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan, 2013.
- Tim Institute for Criminal Justice Reform, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ICJR, 2017.

Jurnal

- Agustinus, Samuel, Eko Soponyono, & Rahayu. "Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 4 (2016).
- Amnesty International, "Death Sentences and Executions 2023: Global Report", *Amnesty International Publications* (2024).

- Anggraini, Lidya, “Analisis Pasal 100 Ayat 1 dan 2 KUHP 2023 tentang Pemberian Masa Percobaan pada Terpidana mati Menurut Hak Asasi Manusia dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Curup* (Agustus 2024): 61
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 19 No. 1 (Januari, 2019).
- Azwar, Azrul, “Double Punishment dalam Pidana Mati: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 2 (2021).
- Christiansen, Karl O., “Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy”, *Resource Material Series* No. 7 (1974).
- Dewanto, Daffa Rizky, & Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5 No. 1 (2023).
- Dewi, Luh Putu Trisna, & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Fenomena Death Row dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 18, No. 1 (2018).
- Dewi, Melisa & Bambang Tri. “Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* Vol. 4 (Oktober, 2020).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6 No. 1 (Februari 2020).
- Karmila, Suci Arinda, Eka Putri & Sintong Arion Hutapea. “Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM dan Kriminologi”. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 3, 128. (2025)
- Marhendra, I Made Bayu Arya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Penerapan Hukuman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan China”, *Jurnal Kertha Wicara* Vol 14 No 06 (2025).
- Najib, M. Ainun, Nisbati Sandiah, Putri Silvah, & Mohammad Arif. “Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Pidana Islam”, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 6 (Desember, 2022).
- Putra, Aista Wisnu, & Rahmi Dwi Susanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 (2020).

- Putri, Dita Melati, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol. 2 No. 4 (November, 2024).
- Rokhim, Abdul, “Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, Edisi No.10 (2015).
- Sipayung, Baren, Orba Manullang, & Henry Kristian. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.7 No.1 (Juni, 2023).
- Sefriani. “Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2013).
- Widayati, Lidya Suryani, “Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus”, *Negara Hukum* Vol. 7, No. 2 (November, 2016).

Artikel & Website

- Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan Kriminal”, Bahan Seminar Kriminolog VI (Semarang, 16-18 September 1991)
- Amnesty International, “Laporan Global Amnesty Internasional Hukuman Mati dan Eksekusi 2023”, <https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2024/05/Rapport-Amnesty-Indonesien.pdf> diakses pada 29 April 2025.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh> diakses pada 28 April 2025.
- Dwi, Anugrah, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”, *Pascasarjana UMSU* <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> diakses pada 4 Februari 2025.
- Mardhiah, Ainal, “Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru”, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/page/2/2023092609233415118778646512a316116bc.html> diakses pada 13 Juni 2025.
- Rivki, “Mereka-mereka yang Jadi Korban Salah Tangkap/Peradilan Sesat.”, <https://news.detik.com/berita/d-3078702/mereka-mereka-yang-jadi-korban-salah-tangkap-peradilan-sesat> diakses pada 1 Juni 2025.
- Serikat Buruh Migran Indonesia, “Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG”. <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/> diakses pada 20 Juni 2025

Thea, Ady D.A., “Amnesty International: Indonesia Signifikan Menyumbang Jumlah Vonis Hukuman Mati”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesty-international--indonesia-signifikan-menyumbang-jumlah-vonis-hukuman-mati-lt67f4918b0a143/?page=all> diakses pada 29 April 2025.

Thesis

Khairul Tamimi, Studi Perbandingan Pidana Mati Dalam Penal Code Negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Brunei Darussalam). Universitas Bung Hatta Padang, 2024.

Wawancara

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Juni 4, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (KUHP WvS).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).